

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Madiun

Tahun 2014 - 2019



PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D.I Panjaitan Nomor 17 Madiun Kode Pos 63137

Telepon (0351) 462153 Fax. (0351) 462153

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga Tim Penyusunan Rencana Strategis dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun lebih konkret.

Perubahan Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi seluruh sumber daya aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Madiun.

Madiun, Agustus 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Bagan	iv
Daftar Tabel.....	v
Keputusan Walikota Madiun	vii
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.....	x
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	8
Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	12
2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16
2.2.1. Pegawai	16
2.2.2. Sarana dan Prasarana	18
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	48
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun Terpilih	55
3.3. Telaahan Renstra Dirjen Kesbangpol dan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	57
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	60

Bab IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	62
4.1	Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	65
4.3	Strategi dan Kebijakan	68
Bab V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDAAN INDIKATIF	76
Bab VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	87



DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 : Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.....	16
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel 2.2	: Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian	17
Tabel 2.3	: Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	17
Tabel 2.4	: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.5	: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan / Ruang ...	18
Tabel 2.6	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ada di Bakesbangpol Kota Madiun	20
Tabel 2.7	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	23
Tabel 2.8	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	26
Tabel 2.9	: Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K / L	50
Tabel 3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	52
Tabel 3.2	: Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	54
Tabel 3.3	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun	57
Tabel 3.4	: Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K / L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	59
Tabel 4.1	: Perumusan Perwujudan Visi	62
Tabel 4.2	: Perumusan Visi	63
Tabel 4.3	: Penyusunan Penjelasan Visi	64
Tabel 4.4	: Perumusan Misi	65
Tabel 4.5	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatu Bangsa dan Politik Kota Madiun	67



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tabel 4.6	: Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Komunikasi dan Dialog yang konstruktif antar Anggota Masyarakat dalam Persoalan Kemasyarakatan	68
Tabel 4.7	: Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran : Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam persoalan kemasyarakatan	69
Tabel 4.8	: Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu...	70
Tabel 4.9	: Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu...	71
Tabel 4.10	: Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	71
Tabel 4.11	: Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	72
Tabel 4.12	: Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .	74
Tabel 5.1	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	80
Tabel 6.1	: Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun	88



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.204/183 /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.202/233/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2014-2019

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- 3 -

17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 1 Agustus 2017



H. SUGENG BISMILYANTO, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.204/ 183 /2017
TANGGAL : 1 Agustus 2017

DAFTAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Sekretariat DPRD
2.	Bagian Umum Sekretariat Daerah
3.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
4.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
8.	Inspektorat
9.	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Rumah Sakit Umum Daerah
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Badan Kepegawaian Daerah
14.	Badan Pendapatan Daerah
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
18.	Dinas Pendidikan
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
21.	Dinas Perhubungan
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.	Dinas Perdagangan
26.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
28.	Dinas Tenaga Kerja



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- 2 -

1	2
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Dinas Lingkungan Hidup
31.	Dinas Komunikasi dan Informatika
32.	Kecamatan Kartoharjo
33.	Kecamatan Manguharjo
34.	Kecamatan Taman

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

NOMOR : 050 – 401.205 / 33 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 050 – 401.203 / 26 / 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

TAHUN 2014-2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut Pasal 96 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 - 2019.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- 2 -

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
 13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 - 2025;
 14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- 3 -

15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Mengubah Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Nomor : 050–401.203/26/2014 Tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Tahun 2014-2019.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal : 8 Agustus 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



BAMBANG SUBANTO, SH

Pembina

NIP. 19580906 199803 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan politik nasional yang terjadi telah melahirkan suatu gerakan reformasi yang menuntut perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan bahkan perubahan pada sistem pertahanan keamanan. Semua itu menuntut adanya suatu penerapan dari prinsip-prinsip demokratisasi, desentralisasi, transparansi serta keadilan dengan menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi dan dilaksanakan oleh Pemerintah diantaranya melalui amandemen UUD 1945, pemberlakuan Otonomi Daerah, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pembentukan Komnas HAM dan lain-lain.

Dalam merespon perubahan dan penerapan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara pun telah mengalami perubahan-perubahan, seperti misalnya dalam bidang politik. Berdasar pemaparan tersebut di atas jelas bahwa peran pemerintah yang pada masa lalu sangat kuat, kini harus dibagi dan dilaksanakan bersama-sama, baik dengan masyarakat maupun dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pembagian peranan sebagaimana dimaksud, dirasakan sangat efektif untuk diterapkan di era Otonomi Daerah dewasa ini. Pemikiran tersebut didasarkan pada anggapan bahwa lembaga pemerintah di daerah beserta seluruh warga masyarakatnya adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan yang terjadi terkadang dapat membahayakan atau mengancam keutuhan bangsa. Hal ini disebabkan munculnya paham-paham egoisme kedaerahan dan juga seluruh komponen bangsa belum sepenuhnya menyadari dan memahami tujuan dari pemberlakuan Otonomi Daerah. Disinilah perlunya diadakan suatu perencanaan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

pembangunan yang terencana, komprehensif namun tetap memperhatikan eksistensi daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik administratif, geografis, filosofis maupun ideologis. Selain itu, perencanaan dimaksud juga merupakan tanggung jawab dan transparansi dari pelaksana pembangunan (dalam hal ini pemerintah) kepada semua warga masyarakatnya, termasuk menjadi alat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD. Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus ada keterkaitan antara visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, pokok-pokok isi dokumen Renstra Perangkat Daerah dan status hukum Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dokumen Renstra berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dengan adanya Renstra tersebut maka setiap aparatur dalam Perangkat Daerah memiliki panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi,



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang juga memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mendukung upaya Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan keadaan / kondisi ideal yang ingin diraih demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Madiun serta digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun perlu membuat perencanaan yang strategis, terarah, terukur dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan dari warga masyarakat serta mempertimbangkan pula skala prioritas dan kemampuan atau sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan secara strategis mensyaratkan suatu proses penyusunan yang dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan memperhatikan aspek geografis dan demografis termasuk pergerakan / perubahan / dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, termasuk juga mempertimbangkan masalah-masalah yang sangat mendesak dan menonjol untuk segera ditangani, agar kondisi ideal yang diharapkan dapat segera terwujud.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersebut merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program lima tahun ke depan, serta dengan memperhatikan skala prioritas. Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Selain itu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Nomor : 050-401.203/26/2014 tanggal 19 September 2014 berpedoman pada RPJMD Kota Madiun serta bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan Walikota Madiun.

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dilaksanakan dengan melakukan review terlebih dahulu terhadap RPJMD Kota Madiun guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan propinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun. membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Madiun. Dengan perubahan Perangkat Daerah, maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh kepala perangkat daerah, menjadi Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tahun 2014-2019.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

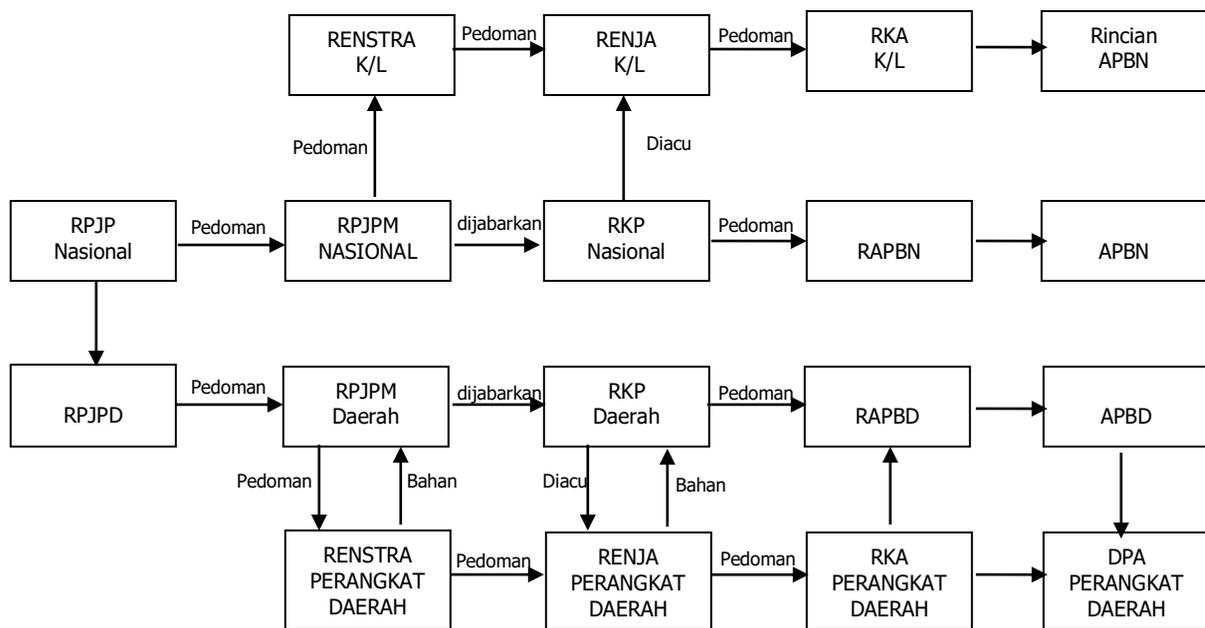
- a. persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. penyusunan rancangan Renstra PD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
- d. penetapan Renstra PD.

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan PERANGKAT DAERAH akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.



Hubungan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor xx tahun 2016 tentang RPJMD Kota madiun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 selajutnya disebut Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Tahun 2017 – 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun di bidang kesatuan bangsa dan politik yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka menengah;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
- d. Sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;
- e. Sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun ini adalah :



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Pengendalian pencapaian nilai indikator kinerja;
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
- d. Memberikan arah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2014 - 2019;
- e. Sebagai alat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019;
- f. Merupakan bentuk akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2014 - 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun serta keterkaitannya dengan RPJMD, K / L dan Renstra Provinsi dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II **Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun**
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, struktur organisasinya serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset / modal.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

2.3. Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra SKPD Provinsi dan Kota Madiun

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K / L ataupun Renstra SKPD Provinsi dan Kota Madiun.

3.4. Penentuan Isu–Isu Strategis



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

4.3. Strategis dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MADIUN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan unsur pelayanan pemerintah di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, organisasi yang melakukan pelayanan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa disebut sebagai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Untuk menjalankan kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tersebut sebagai berikut :

Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun maka susunan organisasinya dibentuk sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu : Sekretaris
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Ideologi
 2. Bidang Ketahanan Bangsa
 3. Bidang Lembaga Politik dan Orkemas

Adapun rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, Hak Asasi Manusia, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
3. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan badan;
5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan badan;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan badan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Bidang Ideologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi bina ideologi, bela negara, Hak Asasi Manusia dan kewaspadaan nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Ideologi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, bela negara dan Hak Asasi Manusia;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang ketahanan bangsa;
 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan seni, budaya dan agama;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi;
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- e. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

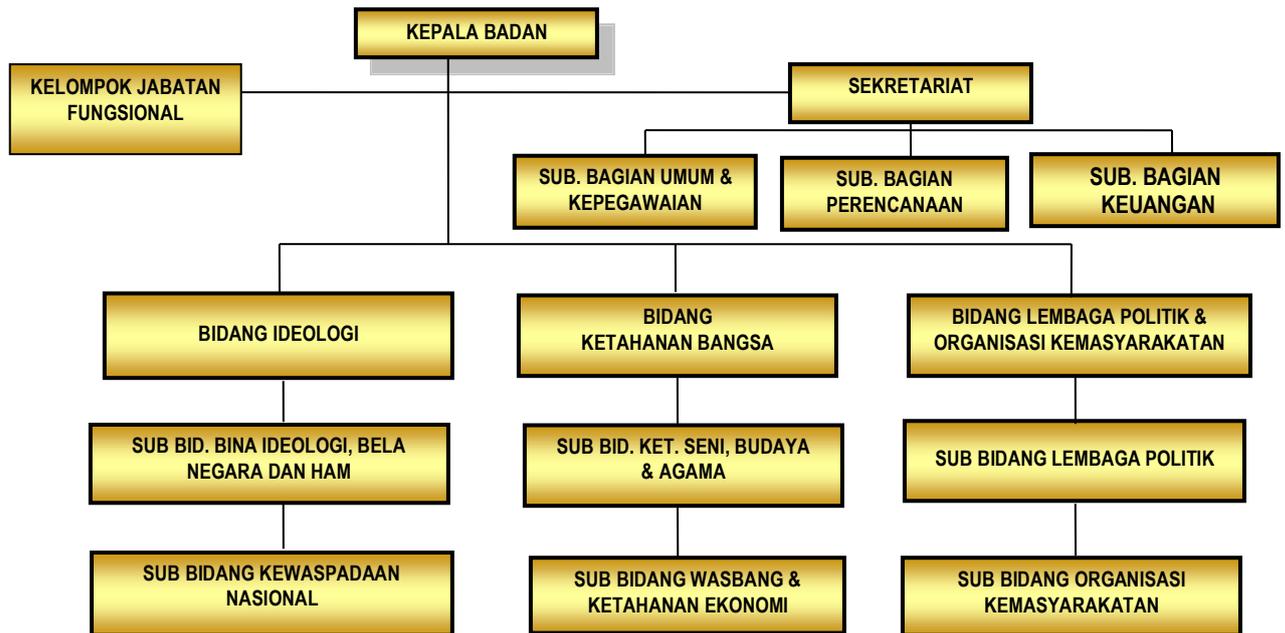
1. Penyusunan perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitas di bidang politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana bagan di bawah ini :

Bagan II.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Madiun



Sumber: Lamp. XII Perda Kota Madiun, Nomor 04 Th. 2013, Tanggal 18 September 2013

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung oleh 34 (tiga puluh empat) pegawai, baik PNS maupun Tenaga Kontrak Kerja, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	24 orang
2	Perempuan	5 orang
Jumlah		31 orang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	29 orang	9 orang diperbantukan di KPU
2	Tenaga Kontrak	2 orang	-

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No.	Posisi	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
2	Sekretariat	Sekretaris	1 orang
		Kasubag	3 orang
		Staf	6 orang
3	Bidang Ideologi	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
4	Bidang Ketahanan Bangsa	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	1 orang
5	Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
6	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Sekretaris	1 orang
		Kasubag	4 orang
		Staf	4 orang

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2	Sarjana (S-1)	18 orang
3	Diploma (D-3)	1 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8 orang
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 orang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Jumlah	29 orang
---------------	-----------------

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang

No	Pangkat, Gol./Ruang	Eselon				
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Non EsI
1	Pembina (IV/a)	1	1	3		-
2	Penata Tk. I (III/d)				9	4
3	Penata (III/c)					-
4	Penata Muda Tk. I (III/b)					3
5	Penata Muda (III/a)					4
6	Pengatur Tk. I (II/d)					-
7	Pengatur (II/c)					1
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)					2
9	Pengatur Muda (II/a)					1
10	Juru Tk. I (I/d)					
11	Juru (I/c)					
12	Juru Muda Tk. I (I/b)					
13	Juru Muda (I/a)					
14	Non PNS					2

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana fisik maupun non fisik.

Bangunan gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang beralamat di Jalan Udowo No. 1 Madiun terdiri dari :

1. Ruang Kepala Badan
2. Ruang Sekretariat
3. Ruang Bidang Idiologi
4. Ruang Bidang Ketahanan Bangsa
5. Ruang Bidang Politik dan Perlindungan Masyarakat



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

6. Ruang Tamu
7. Ruang Rapat
8. Ruang Mushola

Disamping ruangan tersebut di atas, masih terdapat 3 (tiga) buah kamar mandi / WC serta tempat parkir untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 bagi karyawan.

Dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pada masing-masing ruangan (kecuali ruang tamu dan mushola) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terdapat AC walau tak semuanya berfungsi dengan baik. Selain itu, masing-masing ruangan sudah dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet, kecuali Ruang Kepala Badan, Ruang Tamu, Ruang Rapat dan Mushola.

Selain itu, guna memperlancar mobilitas para pegawai, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersedia 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda 2 (dua).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan beberapa tambahan ataupun perbaikan agar sarana dan prasarana tersebut selalu dalam keadaan siap pakai. Dengan demikian diharapkan pelayanan dan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun semakin meningkat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas sehari-hari secara terperinci adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Bakesbangpol Kota Madiun

No	Nama Barang	Jumlah (Buah/Unit/ Satuan)	Kondisi Aset
1	2	3	4
1.	Mobil	1	baik
2.	Sepeda Motor	23	baik
3.	Filling	3	baik
4.	Brankas	1	baik
5.	Lemari Kaca	2	baik
6.	Papan Visual Kegiatan	2	baik
7.	Papan Nama Instansi	1	baik
8.	Lemari Kayu	7	baik
9.	Kursi Tamu	3	baik
10.	Meja Rapat	3	baik
11.	Meja Tulis Kerja	1	baik
12.	Meja Telepon	2	baik
13.	Kursi Rapat	6	baik
14.	Kursi Tangan	4	baik
15.	Kursi Putar	5	baik
16.	Kursi Lipat	10	rusak ringan
17.	Korden	1	baik
18.	AC	7	baik
19.	Kipas Angin	7	baik
20.	Radio	1	rusak ringan
21.	Laser Disc	1	rusak berat
22.	Wireless	1	rusak ringan
23.	Lambang Garuda Pancasila	2	baik
24.	Gambar Presiden	1	baik
25.	Gambar Wakil Presiden	1	baik
26.	Guci Tempat Air	1	baik



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

27.	Gerobak Sampah	1	rusak berat
No	Nama Barang	Jumlah (Buah/Unit/ Satuan)	Kondisi Aset
1	2	3	4
28.	Laptop	2	baik
29.	Printer	5	rusak ringan
30.	HT	12	baik
31.	Facsimile	2	rusak berat
32.	Bangunan Gedung	3	baik
33.	LCD	1	baik
34.	Komputer	10	rusak ringan
35.	UPS	1	baik
36.	Kamera	3	baik
37.	Handycam	1	baik
38.	Lensa Kamera	2	baik
39.	Alat Perekam	1	baik
40.	Note Book	4	baik
41.	Mobil	1	baik
42.	Alat Potong Rumput	1	baik
43.	Repeater	1	baik
44.	Base Station	1	baik
45.	Power Mixer	1	baik
46.	Speaker	1	baik
47.	Stand Speaker	2	baik
48.	Kabel Audio	1	baik
49.	Mic Audio	1	baik
50.	Mic Shure	1	baik
51.	Televisi	2	baik
52.	Kursi Lipat Rapat	45	baik
53.	DVD	1	baik



2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Unsur pelayanan yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun meliputi bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa yang antara lain berupa :

1. Pemberian ijin penelitian / survey kepada warga masyarakat / lembaga yang akan mengadakan penelitian / survey di wilayah Pemerintah Kota Madiun;
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaan atau mengajukan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun;
3. Fasilitasi kegiatan politik, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, partai politik, penyelenggara Pemilu maupun lembaga terkait lainnya;
4. Melaksanakan fungsi intelijen daerah;
5. Pelestarian, peningkatan pemahaman serta mempertahankan ideologi bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat pada bidang ketahanan bangsa;
7. Memberi pemahaman akan pentingnya HAM dan penegakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. Fasilitasi kerukunan warga masyarakat dan menghindari SARA;
9. Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama.

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran / target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

kinerja pelayanan SKPD dan / atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase pemilih yg menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Ka. Daerah (Pilgub & Pilwakot)	-	-	80%	-	-	-	-	47%	-	-	-	-	47%	-	-	-	-	47%
2.	Prosentase pemilih yg menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden	-	-	80%	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-
				75 buku	75	75				75	75				100%	100%			
3.	Jumlah satuan keamanan lingkungan di masyarakat	-	-	900 linmas	780 linmas	-	-	-	-	780 linmas	-	-	-	-	86%	-	-	-	-
4.	Jumlah petugas Linmas utk mengamankan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilgub & Pilwakot)	-	-	1300 linmas PNS & masy	900 linmas	-	-	-	-	900 linmas	-	-	-	-	69%	-	-	-	-
5.	Jumlah petugas Linmas utk mengamankan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden	-	-	1300	900 linmas	-	-	-	-	900 linmas	-	-	-	-	69%	-	-	-	-
6.	Jumlah pertemuan anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB	-	-	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	4 FKUB, 4 DP, 1Forkom kon	99%	91%	99%	99%	100%
7.	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Wasbang dan Bela Negara	-	-	350 orang	-	-		3500	6.706	-	-	-	350	6.706	-	-	-	100%	100%



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8.	Jumlah peserta yg mengikuti penyuluhan tentang ideologi dan HAM	-	-	350 orang	-	-	-	350	-	-	-	-	350	-	-	-	-	100%	-
9.	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	-	-	150 orang	-	-	-	150 orang	-	-	-	-	150 orang	-	-	-	-	100%	-
10.	Jumlah pemantauan oleh aparat Bakesbangpol dan Linmas	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	300.567	-	99.586	99.906	99.865	298.044	-	99%	99%	99%	99%
11.	Berjalannya kegiatan intelijen di daerah	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	99%	100%
12.	Jumlah pertemuan/rakor intelijen daerah	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100%	99%
13.	Jumlah koordinasi dan diklat intelijen	-	-	20 koordinasi, 10 diklat	20	20	20	-	-	20	20	20	-	-	99%	99%	99%	-	-
14.	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana alam	-	-	1unit perahu karet, 1unit tenda	1unit perahu karet, 1unit tenda	-	-	-	-	1unit perahu karet, 1unit tenda	-	-	-	-	98%	-	-	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Dari tabel di atas dapat terlihat kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun saat masih menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Selanjutnya untuk pembahasan atas kinerja tahun 2009 s/d 2013 menggunakan nama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun.

Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam tabel di atas tidak dapat diukur dari target SPM, karena Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Kegiatan-kegiatan pada tahun 2009 - 2014 lebih banyak bersifat kegiatan tahunan, bukan kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu, sehingga capaian kegiatan langsung terlihat dalam tahun tersebut.

Dari rasio capaian kegiatan terlihat bahwa rasio capaian pada hampir semua kegiatan adalah di atas 95%. Namun, untuk kegiatan Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Gubernur dan Pemilu Walikota) prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 47%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dan masih banyak yang memilih untuk golput (tidak memilih). Oleh sebab itu kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat masih perlu ditingkatkan dan terus dilakukan pada masa yang akan datang.

Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tingkat capaian petugas Linmas untuk pengamanan kegiatan tersebut mencapai sebesar 69%. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2013 fungsi Linmas berpindah dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.



Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TH					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pembangunan Daerah																	
Penyusunan Renstra	23.000	0	0	0	0	22.063	0	0	0	0	95,93%	0	0	0	0	-	-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	129.696	0	0	0	0	87.730	0	0	0	0	67,64%	0	0	0	0	-	-
Pembekalan petugas Linmas di TPS	110.365	0	0	0	0	108.398	0	0	0	0	82,18%					-	-
Gelar pasukan Linmas	51.635	0	0	0	0	51.575	0	0	0	0	99,88%	0	0	0	0	-	-
Pengendalian keamanan lingkungan	0	100.000	100.000	0	0	0	99.586	99.906	0	0	0	99,59%	99,91%	0	0	-	-
Penyuluhan/pembinaan terhadap tokoh masyarakat dan pemuda	0	0	30.400	0	0	0	0	30.400	0	0			100%	0	0	-	-
Peningkatan pelayanan perijinan survey/penelitian	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	100%	0	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TH					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	25.000	0	0	0	0	24.966	0	0	0	0	99,86%	0	0	0	0	-	-
Pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat serta verifikasi bantuan politik	0	20.000	20.000	20.000	0	0	19.950	19.950	20.000	0	0	99,75%	99,75%	100%	0	-	-
Koordinasi dan diklat intelijen daerah Tingkat Kota, Propinsi dan Pusat	0	0	0	50.000	173.533	0	0	0	49.890	173.533	0	0	0	99,76%	100%	-	-
Pengendalian keamanan lingkungan	0	0	0	100.000	300.567	0	0	0	99.865	298.044	0	0	0	99,86%	99,16%	-	-
Peningkatan pelayanan perijinan survey/penelitian	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	24.982	0	0	0	0	99,93%	-	-
Pemantauan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat	0	0	0	0	53.337	0	0	0	0	53.337	0	0	0	0	100%	-	-
Fasilitasi keamanan dan ketertiban masyarakat	0	0	0	0	765.315	0	0	0	0	765.315	0	0	0	0	100%	-	-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	50.000	50.000	50.000	0	52.962	49.874	45.435	45.435	0	52.962	99,75%	90,87%	90,87%	0	100%	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TH					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	ANGGAR AN	REALI-SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Pembinaan Wasbang dan Bela Negara	0	0	0	0	687.763	0	0	0	0	634.913	0	0	0	0	92,32%	-	-
Peningkatan Pembinaan Ideologi dan HAM	0	0	0	0	161.769	0	0	0	0	161.444	0	0	0	0	99,80%	-	-
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	0	0	0	0	57.469	0	0	0	0	56.391	0	0	0	0	98,12%	-	-
Pemutakhiran data dan verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	11.983	0	0	0	0	99,86%	-	-
Pemutakhiran data & pembinaan serta monitoring keberadaan dan Ormas / LSM	0	0	0	0	104.609	0	0	0	0	104.227	0	0	0	0	99,63%	-	-
Fasilitasi komunikasi dan koordinasi Ormas/LSM	0	0	0	0	57.209	0	0	0	0	56.196	0	0	0	0	98,23%	-	-
Program Pendidikan Politik Masyarakat																	
Penyuluhan pada masyarakat	25.000	0	0	0	1.334.872	23.939	0	0	0	1.334.872	95,76%	0	0	0	100%	-	-
Database Parpol	15.000	10.000	0	0	0	13.495	8.426	0	0	0	0,9%	08%	0	0	0	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	-	-
Koordinasi forum-forum diskusi politik	200.000	0	0	0	0	192.189	0	0	0	0	96%					-	-
Pemutakhiran data dan verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol	0	0	0	10	0	0	0	0	9.979	0	0	0	0	96,04%	0	-	-
Koordinasi dan konsolidasi Parpol	0	0	0	75.000	0	0	0	0	74.946	0	0	0	0	99,93%	0	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TH					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	2009 (ribu)	2010 (ribu)	2011 (ribu)	2012 (ribu)	2013 (ribu)	ANGGAR AN	REALI-SASI
1	2	3	12	17	17	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Posko dan monitoring Pemilu Walikota	0	0	0	0	990.405.000	0	0	0	0	461.491.000	0	0	0	0	46,60%	-	-
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																	
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	57.000.000	0	0	0	0	55.986.000	0	0	0	0	98,22%	0	0	0	0	-	-
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																-	-
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	49.924.000	0	0	0	0	99,85%	0	-	-
Pemutakhiran data dan pembinaan serta monitoring keberadaan & Ormas / LSM	0	0	0	154.251.000	0	0	0	0	153.794.000	0	0	0	0	99,70%	0	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019



Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari selisih penganggaran dan realisasi yang hanya sedikit. Sedangkan rasio capaian antara realisasi dan penganggaran di atas 95%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kegiatan dapat dijalankan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri yang direalisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun pada tahun 2009 - 2014, adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Tahun 2009

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2009 - 2014, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 8 Program dan 16 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Renstra



4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Kegiatan Pembekalan Petugas Linmas Di TPS
 - c. Kegiatan Gelar Pasukan Linmas
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
6. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyuluhan pada Masyarakat
 - b. Kegiatan Database Partai Politik
 - c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban bencana alam

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.417.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 43.258.250,00 (95%). Keluarannya adalah penyediaan peralatan bahan penunjang, sehingga dapat terwujud kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.873.000,00 dan terealisasi Rp. 24.239.000,00 (97%). Pelakasanaannya untuk perjalanan dinas keluar daerah, sehingga koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat berjalan lancar.



2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,00 telah dapat terealisasi Rp. 2.000.000,00 (100%). Wujud kegiatannya adalah pengecatan gedung / bangunan kantor sehingga terwujud gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.420.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 14.420.000,00 (100%). Bentuk kegiatannya adalah pemeliharaan rutin 1 unit kendaraan dinas roda empat dan perpanjangan STNK, sehingga dapat terwujud kendaraan dinas yang aman dan nyaman.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.400.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 6.400.000,00 (100%) untuk pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor sehingga terwujud sarana kantor yang layak pakai.
3. Program Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan Renstra dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.062.500,00 (96%). Keluarannya adalah 1 dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2009 - 2014 yang telah tersusun sesuai rencana.
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 129.696.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 87.729.800,00 (68%). Keluarannya adalah jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Kegiatan Pembekalan Petugas Linmas di TPS dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.365.000,00 dan terealisasi Rp. 108.398.400,00 (98%). Keluarannya adalah tersedianya tenaga pengendali keamanan di lingkungan TPS sejumlah 780 orang.



- c. Kegiatan Gelar Pasukan Linmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 51.635.000,00 telah dapat terealisasi sebesar Rp. 51.575.000,00 (99,9%). Keluarannya adalah terlaksananya gelar pasukan Linmas sejumlah 780 orang dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 49.873.750,00 (99,7%). Kegiatannya berupa 4 kali pertemuan FKUB, 4 kali pertemuan Dewan Penasehat FKUB serta 1 kali pertemuan Forkomkon sehingga dapat meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Madiun.
6. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi Rp. 24.966.200,00 (99,9%). Keluarannya adalah tersedianya data intelijen untuk bahan kajian dalam pengambilan kebijakan strategis.
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyuluhan pada Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi Rp. 23.939.000,00 (95,8%). Keluarannya adalah fasilitasi dan sosialisasi Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang telah berjalan dengan baik dan lancar.
 - b. Kegiatan Database Partai Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 13.494.600,00 (90%). Keluarannya adalah tersedianya dokumen tentang database Partai Politik yang ada di Kota Madiun.
 - c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 (100%). Keluarannya adalah adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Madiun.



- d. Kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 192.189.350,00 (96,1%). Keluarannya adalah fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang berjalan dengan baik dan lancar.
8. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencana Alam dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 55.986.000,00 (98,2%). Keluarannya adalah pengadaan 1 unit perahu karet dan 1 unit tenda.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2010

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2009 - 2014, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun Anggaran 2010 melaksanakan 4 Program dan 7 Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendali Keamanan lingkungan
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan database Partai Politik

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.208.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.188.000,00 (100%). Keluarannya adalah berupa penyediaan



- peralatan bahan penunjang sehingga dapat terwujud kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.873.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.861.000,00 (100%). Keluarannya adalah Perjalanan Dinas Keluar Daerah, sehingga dapat terwujud kelancaran dalam koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,00 telah terealisasi Rp. 2.000.000,00 (100%). Keluarannya adalah pengecatan gedung / bangunan kantor sehingga dapat terwujud gedung Kantor yang bersih dan nyaman.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.150.000,00 telah dapat terealisasi Rp. 12.080.000,00 (100%). Keluarannya adalah pemeliharaan rutin 1 unit kendaraan dinas roda empat dan perpanjangan STNK sehingga dapat terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.400.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.400.000,00 (100%) untuk pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor sehingga terwujudnya sarana kantor yang layak pakai.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendali Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 telah dapat terealisasi sebesar Rp. 99.586.200,00 (99,6%). Keluarannya adalah tersedianya data informasi intelijen.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat



Kegiatan Database Partai Politik dengan alokasi dana Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.426.357,00 (84,3%) dengan keluaran tersedianya dokumen tentang database Partai Politik di Kota Madiun.

3. Program dan Kegiatan Tahun 2011

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2009 - 2014, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun Anggaran 2011 dengan melaksanakan 6 Program dan 10 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - b. Kegiatan Penyuluhan / Pembinaan Terhadap Tokoh Masyarakat dan Pemuda
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
6. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Kegiatan Pemantauan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat serta Verifikasi Bantuan Partai Politik.

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.808.000,00 dapat terealisasi



- sebesar Rp. 45.714.000,00 (99,79%). Keluarannya berupa penyediaan peralatan bahan penunjang sehingga dapat terwujud kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 29.887.400,00 (99,62%). Keluarannya adalah perjalanan dinas keluar daerah, sehingga dapat terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (100%). Keluarannya adalah pengecatan gedung / bangunan kantor, sehingga dapat terwujud gedung kantor yang bersih dan nyaman.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.930.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 12.730.000,00 (98,45%). Keluarannya adalah pemeliharaan rutin 1 unit kendaraan dinas roda empat dan perpanjangan STNK, sehingga dapat terwujud kendaraan dinas yang aman dan nyaman.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.400.000,00 yang telah terealisasi Rp. 7.400.000,00 (100%) untuk pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor sehingga terwujud sarana kantor yang layak pakai.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi Rp. 49.291.000,00 (98,58%). Keluarannya adalah pengadaan peralatan kantor berupa 3 unit computer PC, 1 unit AC, 1 unit kamera digital, 1 unit handycam, 2 unit alat perekam dan 1 unit lensa kamera.
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- a. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.905.950,00 (99,80%). Keluarannya adalah 12 laporan data informasi intelijen sehingga dapat terwujud keamanan dan ketertiban lingkungan.
 - b. Penyuluhan / Pembinaan Terhadap Tokoh Masyarakat dan Pemuda dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.400.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 30.400.000,00 (100%). Keluarannya adalah pelaksanaan penyuluhan / pembinaan tokoh masyarakat dan pemuda sehingga diharapkan adanya peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat kelurahan.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Kegiatan Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 45.435.000,00 (90,87%). Keluarannya adalah 4 kali pertemuan FKUB, 4 kali pertemuan Dewan Penasehat FKUB serta 1 kali pertemuan Forkomkon sehingga kerukunan umat beragama di Kota Madiun semakin meningkat.
6. Kegiatan Pemantauan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat serta Verifikasi Bantuan Partai Politik.
- Kegiatan Pemantauan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat serta Verifikasi Bantuan Partai Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.950.000,00 (99,75%). Keluarannya adalah data informasi keamanan dan ketertiban serta verifikasi bantuan terhadap Partai Politik sehingga dapat terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta terverifikasinya bantuan kepada semua Partai Politik di Kota Madiun.

4. Program dan Kegiatan 2012

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2009 - 2014, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun Anggaran 2012 melaksanakan 8 Program dan 18 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - b. Kegiatan Rehab Gedung / Bangunan
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Survey / Penelitian
 - b. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Ketahanan Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
 - b. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 - c. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Idiologi dan HAM
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Partai Politik
7. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Verifikasi Bantuan Partai Politik
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Diklat Intelijen Daerah Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat
 - c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan



8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Kegiatan Pemutakiran Data dan Pembinaan serta Monitoring Keberadaan dan Organisasi Kemasyarakatan / LSM
 - b. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 58.408.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 58.408.000,00 (100%). Keluarannya adalah penyediaan peralatan bahan penunjang sehingga terwujud kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 45,100,000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 45,098,000,00 (100%). Keluarannya adalah perjalanan dinas keluar daerah, sehingga koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat berjalan lancar.
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (100%). Keluarannya adalah pengecatan gedung / bangunan kantor, sehingga dapat terwujud gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana Sebesar Rp. 17.130.000,00 telah dapat terealisasi sebesar Rp. 15,161,500.000,00 (88,51%). Keluarannya adalah pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat, sehingga terwujud kendaraan dinas yang aman dan nyaman.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 7,400,000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 7,400,000,00 (100%). Keluarannya adalah pemeliharaan



rutin sarana prasarana kantor sehingga dapat terwujud sarana kantor yang layak pakai.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 327,325,000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 324,181,000,00 (98,58%). Keluarannya adalah tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit kendaraan roda 4, 6 unit sepeda motor, 1 unit komputer *all in one*, 3 unit AC, 1 unit mesin *faximile* dan 1 unit mesin pemotong rumput sehingga mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Gedung / Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000,000,00 terealisasi 197,860,000,00 (98,93%). Keluarannya adalah pemeliharaan gedung pertemuan dan pagar sehingga gedung kantor terpelihara dengan baik.
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Survey / Penelitian dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp. 20,000,000,00 (100%). Keluarannya adalah tersedianya 12 laporan berupa data dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan survey / penelitian yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun.
 - b. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 100,000,000,00 dan telah terealisasi Rp. 99,864,850,00 (99,86%). Keluarannya adalah jumlah pertemuan / rakor intelijen dengan instansi terkait sehingga diperoleh data dan informasi intelijen.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49,727,500,00 (99,46%). Keluarannya adalah



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- pelaksanaan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan sehingga terwujud kerukunan hidup bermasyarakat.
- b. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dengan alokasi dana sebesar Rp.50,000,000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp.50,000,000,00 (100%). Keluarannya adalah jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara dan hasil yang diharapkan adalah masyarakat yang berbudaya.
 - c. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Ideologi dan HAM dengan alokasi dana sebesar Rp. 119,024,000,00 dan terealisasi Rp. 118,833,500,00 (99,84%). Keluarannya adalah jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ideologi dan HAM sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- a. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 10,000,000,00 telah terealisasi Rp. 9,979,600,00 (99,80%). Keluarannya adalah verifikasi 11 parpol sehingga dapat terlaksana verifikasi terhadap 11 parpol yang memperoleh bantuan keuangan
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Partai Politik dengan alokasi dana sebesar Rp.75,000,000,00 yang terealisasi Rp. 74,945,850,00 (99,93%). Keluarannya adalah pelaksanaan 5 kali koordinasi dan konsolidasi.
7. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a. Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Verifikasi Bantuan Partai Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 20,000,.000,00 (100%). Keluarannya adalah tersedianya data informasi sehingga terwujud kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta terverifikasinya bantuan kepada Partai Politik di Kota Madiun.



- b. Kegiatan Koordinasi dan Diklat Intelijen Daerah Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp. 50,000,000,00 dan telah terealisasi Rp. 49,889,600,00 (99,78%). Keluarannya adalah terlatihnya aparat intelijen daerah sehingga tersedia aparat intelijen daerah dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
8. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan
- a. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Pembinaan serta Monitoring Keberadaan dan Organisasi Kemasyarakatan / LSM dengan alokasi dana sebesar Rp. 154,251,000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 153,794,000,00 (99,70%). Keluarannya adalah terlaksananya komunikasi dan konsultasi organisasi kemasyarakatan sehingga fungsi dan peran organisasi sosial masyarakat dapat berjalan maksimal.
 - b. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dengan alokasi dana Rp. 50,000,000,00 yang terealisasi Rp. 49,924,000,00 (99,85%). Keluarannya adalah 4 kali pertemuan FKUB, 4 kali pertemuan dewan penasehat FKUB dan 1 kali Forkomkon FKUB sehingga fasilitasi kegiatan forum keagamaan dapat berjalan baik.

5. Program dan Kegiatan 2013

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2009 - 2014, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan 7 Program dan 21 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - b. Kegiatan Rehab Gedung / Bangunan
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
 - b. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 - c. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Idiologi dan HAM
 - d. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - e. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Pembinaan serta Monitoring Keberadaan dan Organisasi Kemasyarakatan / LSM
 - f. Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas / LSM
 - g. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat
 - b. Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Walikota
6. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
 - a. Kegiatan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Diklat Intelijen Daerah Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat
 - c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Survey / Penelitian
 - e. Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.283.000,00 telah dapat terealisasi sebesar Rp. 52.256.050,00 (75,4%). Keluarannya adalah



- penyediaan peralatan bahan penunjang sehingga dapat terwujud kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.610.000 dan terealisasi Rp. 41.409.000,00 (83,5%). Keluarannya adalah perjalanan dinas keluar daerah sehingga koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat berjalan dengan lancar.
2. Program Pemeliharaan Barang Daerah
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana Rp. 2.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 2.000.000,00 (100%). Keluarannya adalah pengecatan gedung / bangunan kantor, sehingga terwujud gedung kantor yang representative.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.421.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.191.000,00 (57,9%). Keluarannya adalah pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat, sehingga dapat terwujud kendaraan dinas yang aman dan nyaman dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.900,000,00 yang terealisasi Rp. 8.860,000,00 (59,5%). Keluarannya adalah pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor, sehingga terwujud sarana kantor yang layak pakai.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 124.609.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 118.830.000,00 (95,4%). Keluarannya adalah tersedianya peralatan kantor berupa *notebook*, komputer dan *printer*, *sound system*, RIG, HT, kursi rapat, TV, kipas angin dan kamera saku, sehingga pelaksanaan tugas pokok sehari-hari dapat berjalan lancar.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- b. Kegiatan Rehabilitasi Gedung / Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 195.000,000,00 dan telah terealisasi Rp. 118.936.000,00 (61%). Keluarannya adalah rehab plafon gedung pertemuan, papan nama, pagar dan tempat parkir, sehingga terwujud gedung yang representatif.
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Beragama dengan alokasi dana sebesar Rp. 52,962,000,00 yang terealisasi Rp. 52,962,000,00 (100%). Keluarannya adalah 4 kali pertemuan FKUB, 4 kali pertemuan dewan penasehat FKUB dan 1 kali Forkomkon FKUB sehingga terlaksana fasilitasi kegiatan forum keagamaan.
 - b. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dengan alokasi dana sebesar Rp. 687.763.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 674.913,000,00 (98,1%). Keluarannya adalah jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wasbang dan bela negara, sehingga terwujud masyarakat yang berbudaya.
 - c. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Ideologi dan HAM dengan alokasi dana sebesar Rp. 161.769.000,00 dan terealisasi Rp.161.449.000,00 (99,8%). Keluarannya adalah jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ideologi dan HAM, sehingga terciptanya masyarakat yang berbudaya.
 - d. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan alokasi dana sebesar Rp. 12,000,000,00 dan terealisasi Rp. 11.983.000,00 (99,9%). Keluarannya adalah verifikasi 11 parpol sehingga dapat terlaksana bantuan keuangan terhadap 11 parpol.
 - e. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Pembinaan Serta Monitoring Keberadaan dan Organisasi Kemasyarakatan / LSM dengan alokasi dana sebesar Rp. 104.604.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 104.227.000,00 (99,6%). Keluarannya adalah terlaksananya



- komunikasi dan konsultasi organisasi kemasyarakatan sehingga dapat memaksimalkan fungsi dan peran organisasi sosial masyarakat.
- f. Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas / LSM dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.209.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 56.196.000,00 (98,2%). Keluarannya adalah terlaksananya komunikasi dan konsultasi organisasi kemasyarakatan sehingga dapat memaksimalkan fungsi dan peran organisasi sosial yang ada di masyarakat.
- g. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.469.000,00 terealisasi sebesar Rp. 56.391.500,00 (98,1%). Keluarannya adalah peserta yang mengikuti pembinaan (150 orang) sehingga nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap terjaga dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat.
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- a. Kegiatan Penyuluhan pada Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.334.872.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.334.872.000,00 (100%). Keluarannya adalah fasilitasi dan sosialisasi Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang telah berjalan baik dan lancar.
- b. Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Walikota dengan alokasi dana sebesar Rp. 990.405.000,00 terealisasi sebesar Rp. 461.490.550,00. Keluarannya adalah terselenggaranya posko monitoring dan pelaporan Pemilu Walikota dan Pemilu Gubernur yang berjalan dengan lancar
6. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- a. Kegiatan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta dengan alokasi dana sebesar Rp. 765.315.000,00 dan terealisasi Rp. 765.315.000,00 (100%). Keluarannya adalah tersedianya data informasi tentang situasi dan kondisi dalam masyarakat sehingga terwujud ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat.



- b. Kegiatan koordinasi dan Diklat Intelijen Daerah Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp. 173.533.000,00 dan terealisasi Rp. 173.533.000,00 (100%). Keluarannya adalah terlatihnya aparat intelijen daerah sehingga aparat intelijen daerah mampu mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.567.000,00 dan terealisasi Rp. 298.043.650,00 (99,2%). Keluarannya adalah jumlah pertemuan / rakor intelijen dengan instansi terkait sehingga tersedia data dan informasi intelijen.
- d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Survey / Penelitian dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dan telah dapat terealisasi sebesar Rp. 24.982.000,00 (99,9%). Keluarannya adalah 12 laporan berupa data dan informasi pelaksanaan ijin survey / penelitian sehingga kepuasan masyarakat terhadap survey / penelitian meningkat.
- e. Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 765.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 765.315.000,00 (100%). Keluarannya adalah tersedianya data informasi situasi dan kondisi keamanan sehingga terwujud keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

1. Renstra K / L, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dan Renstra SKPD Provinsi

Analisis Renstra K / L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan yang tertuang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

dalam tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K / L; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun melebihi / sama / kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K / L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun melebihi sasaran Renstra K / L dan Renstra SKPD Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sudah baik secara nasional / provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses / prosedur / mekanisme pelayanan dan strategi / kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K / L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang akan ditangani pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun periode berikutnya. Review tersebut dapat dilakukan pada :

- a. Isu-isu strategis pelayanan K / L dan Renstra SKPD provinsi;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Strategi dan kebijakan;
- d. Program prioritas beserta target kerjanya;
- e. Indikasi lokasi program prioritas;
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K / L dan Renstra SKPD provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan / kebijakan strategis dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan Renstra K / L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K / L dengan provinsi / Kota Madiun.

Komparasi capaian renstra sebagaimana tersebut di atas tampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K / L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K / L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	63.5%	-	-
2.	Jumlah fasilitasi dalam menjaga kerukunan umat beragama	45 kali	-	-
3.	Jumlah peserta Pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, ideology dan HAM	7.556 orang	-	-
4.	Jumlah koordinasi dengan aparat intelijen daerah	44 kali	-	-

Ket : - data tidak tersedia

2. Hasil Telaahan terhadap RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan



aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) aspek yang perlu ditelaah adalah :

- a. Rencana struktur tata ruang;
- b. Struktur tata ruang saat ini;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Pola ruang saat ini, dan
- e. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Hasil telaahan RTRW Kota Madiun dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah bahwa tidak terdapat hubungan antara pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan pola struktur ruang.

3. Hasil Analisis terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan / atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, perwal	1. Intensitas pembinaan Wasbang 2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang 3. Kompetensi narasumber 4. Koordinasi antar instansi terkait	1. Jurang pemisah antara masyarakat mampu & tak mampu 2. Munculnya sifat individualis dalam masyarakat 3. Kehidupan yg makin berat & kompleks 4. Tingkat pendidikan masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara pada sebagian kelompok masyarakat



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Tingkat partisipasi masyarakat dlm berpolitik	Sedang	Peraturan perundangan, perwal	1. Intensitas pembinaan pada masyarakat dan parpol 2. Sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat & anggota parpol 3. Fasilitasi pada partai politik	1. Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik 2. Sikap apatis masyarakat 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Pemahaman ketahanan bangsa dan bela negara masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, Perwal	1. Koordinasi antar instansi terkait 2. Intensitas pembinaan bela negara 3. Cakupan peserta pembinaan bela negara 4. Kompetensi narasumber	1. Kemajuan teknologi informasi sudah sampai ke daerah 2. Efek globalisasi yang sulit dibendung 3. Tingkat pemahaman masyarakat 4. Munculnya berbagai ormas / LSM	Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional & bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat

Permasalahan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
- 2) Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
- 3) Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.

Isu-isu strategis tersebut di atas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
1	Paham pembangunan berbasis masyarakat (<i>people centered</i>) yg semakin meluas di negara-negara berkembang	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan	Masyarakat lebih fokus menghadapi kehidupannya masing-masing yang kian kompleks	Partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih rendah
2	Paham pembangunan berbasis masyarakat (<i>people centered</i>) yg semakin meluas di negara-negara berkembang	Kondisi politik di tanah air yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam berpolitik	Angka golput yang masih cukup tinggi dalam pelaksanaan pemilu	Masyarakat memilih untuk menjadi penonton dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik
3	Globalisasi di segala bidang kehidupan	Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham / aliran yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa	Heterogenitas masyarakat memudahkan munculnya konflik / permasalahan dalam masyarakat	Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun Terpilih

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, disusun untuk dapat menyelesaikan isu yang bersifat lokal juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan sosial budaya, serta di bidang ketahanan dan keamanan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kota Madiun, maka visi Kota Madiun yang hendak dicapai pada tahun 2015 - 2019 adalah :

“Terwujudnya Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera”

Penjabaran makna dari visi Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a. **Maju** mengandung makna :

Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal.

b. **Sejahtera** mengandung makna :

Suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Madiun merumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan dasar atau pedoman disusunnya Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun untuk kurun waktu tahun 2014 - 2019. Dalam hubungannya dengan RPJMD Pemerintah Kota Madiun, Renstra Badan Kesatuan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Bangsa dan Politik sebagai bagian dari RPJMD Kota Madiun. Hal ini mengandung maksud bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sejalan dan searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun.

Ruang lingkup Renstra Pemerintah Kota Madiun merupakan garis besar program kegiatan dan strategi pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun, sedangkan ruang lingkup Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung terwujudnya Renstra Kota Madiun.

Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah misi ketiga yaitu :

"Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan"

Dari perumusan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun di atas, maka Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang sesuai dengan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah :

- a. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- b. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Program pendidikan politik masyarakat;
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Madiun seperti diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.3
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota
 dan Wakil Walikota Madiun

Visi: Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM yg belum terpantau	Pengurus Ormas / LSM belum memahami peraturan perundangan	Ormas / LSM yang aktif menjalankan berbagai kegiatan dalam masyarakat
	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Banyaknya kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik	Banyaknya perbedaan dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
	Program pendidikan politik masyarakat	Hak-hak politik masyarakat yang belum dimanfaatkan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak politiknya	Banyak pemilih pemula banyak yang belum memahami hak-hak politiknya
		Parpol yang belum memenuhi peraturan perundangan yang berlaku	Pengurus Parpol belum memahami peraturan perundangan	Munculnya peraturan perundangan yg baru terkait parpol dan pemilu
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Fasilitasi kerukunan dalam masyarakat terbentur pada heterogenitas masyarakat	Makin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam masyarakat	Adanya wawasan kebangsaan yang perlu terus menerus ditanamkan pada masyarakat

3.3. Telaahan Renstra Dirjen Kesbangpol dan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Telaahan Renstra Dirjen Kesbangpol dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan Renstra Dirjen Kesbangpol sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Visi dan misi Dirjen Kesbangpol adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya persatuan dan kesatuan melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memantapkan sistem politik yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memantapkan wasbang, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan Polsosbud dan hukum segenap negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Adapun visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur adalah :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai Dalam Wadah NKRI

Misi : Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Jawa Timur yang partisipatif, demokratis dan beretika dalam wadah NKRI

Sedangkan hasil dari telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi sasaran jangka menengah yang akan dicapai, yakni :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan tidak pro aktif dalam menyampaikan dokumen kelengkapan organisasi yang terbaru;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas kurang berperan secara maksimal sesuai dengan bidangnya dalam upaya pembangunan di Jawa Timur;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat lokal sering dimanfaatkan oleh LSM asing dalam pencapaian misinya.



Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.4
 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.		Surat Keterangan Terdaftar yang menunjukkan keberadaan Ormas / LSM	1. Ormas / LSM / OKP tidak pro aktif dalam menyampaikan dokumen kelengkapan organisasi yang terbaru 2. Ormas / LSM kurang berperan secara maksimal sesuai dengan bidangnya dalam upaya pembangunan di Jawa Timur 3. LSM lokal sering dimanfaatkan oleh LSM asing dalam pencapaian misinya	Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis, demokratis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengamalan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan & kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa, bela negara dan wasbang

Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun berdasarkan Renstra Provinsi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan Ormas / LSM tentang prosedur pelayanan sehingga pelaksanaan pelayanan belum dapat dilaksanakan secara cepat;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen perijinan, Surat Keberadaan Terdaftar (SKT) dan lain sebagainya sehingga aktivitas mereka bisa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ataupun konflik di dalam masyarakat.



a. Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dirjen Kesbangpol

Sasaran jangka menengah pada Renstra Dirjen Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokrasi dan kedaulatan rakyat.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur juga berpengaruh pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Adapun sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya sistem politik demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif supranatural dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab;
2. Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis, demokratis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengamalan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan;



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

3. Meningkatkan sinergitas penanganan terpadu terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
5. Terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dari berbagai faktor tersebut di atas dapat ditentukan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut :

1. Kurangnya fasilitasi dalam menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen berpotensi menimbulkan gangguan pada persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal;
3. Kurangnya fasilitasi terhadap Ormas / LSM / organisasi lainnya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam merumuskan visi dan misi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Madiun untuk (lima) 5 tahun ke depan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikandung maksud bahwa visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun untuk mencapai kinerja pembangunan daerah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana yang menjelaskan kondisi, keadaan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perwujudan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis	Kurangnya fasilitasi dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat	Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik	Kurangnya fasilitasi terhadap Ormas / LSM / organisasi lainnya
Permasalahan Pembangunan Daerah			
Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara pada sebagian kelompok masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/>		
Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik		<input checked="" type="checkbox"/>	
Masih kurangnya Pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat			<input checked="" type="checkbox"/>



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Inti dari perumusan perwujudan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun di atas dipergunakan sebagai dasar dalam perumusan pokok-pokok visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Selanjutnya dari keseluruhan pokok-pokok visi yang dilakukan dengan mencari inti perwujudan visi maka dibuatlah pernyataan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan sejahtera	Berwawasan kebangsaan dan sejahtera	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera
2.	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	

Berdasar tabel di atas, maka dapat dirumuskan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Menuju Kota Madiun Yang Sejahtera”

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersebut di atas terdiri dari 2 (dua) pokok-pokok visi, yaitu :

- a. Berwawasan Kebangsaan dan Sejahtera
- b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masing-masing pokok-pokok visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam tabel penyusunan penjelasan visi berikut ini :



Tabel 4.3
Penyusunan penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera	Berwawasan kebangsaan dan sejahtera	Mampu mewujudkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya sehingga mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera di segala bidang kehidupan
	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk secara aktif turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh

Berwawasan kebangsaan dan sejahtera adalah mampu mewujudkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya sehingga mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera di segala bidang kehidupan, dalam suasana yang kondusif.

Selanjutnya, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk secara aktif turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh, termasuk di dalamnya ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dan ikut memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

Adapun perumusan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tabel 4.4
Perumusan Misi

No	Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
1.	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera	1. Berwawasan kebangsaan dan sejahtera 2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat	1. Mewujudkan Ketahanan Bangsa Ideologi dan hak asasi manusia serta Kesadaran berpolitik Bangsa

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

“ Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa ”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah merupakan penjabaran dari misi yang telah dirumuskan, yaitu :

Tujuan dari misi tersebut adalah :

- 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural.**
- 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam**



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis.

3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman di masyarakat

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran di sini dilaksanakan secara rutin dan atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam tahun 2014 - 2019.

Sasaran tersebut terdiri dari :

1. Sasaran dari Tujuan ke-1

Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat

2. Sasaran dari Tujuan ke -2

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

3. Sasaran dari Tujuan ke-3

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan target kinerja 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 - 2019 tertuang di dalam tabel 4.5 berikut ini :



VISI “ Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera ”

MISI “ Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa”

Tujuan 1. : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2019
1	Potensi Konflik SARA	$\frac{\text{Potensi konflik bermotif SARA}}{\text{Potensi konflik bermotif SARA seluruhnya}} \times 100$	0%	0%

No.	Sasaran								
	Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	$\frac{\text{Potensi konflik yang tidak terjadi}}{\text{Potensi konflik seluruhnya}} \times 100$	-	54%	56%	100%	100%	100%



Tujuan 2. : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2019
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	$\frac{\text{Jumlah kursi di DPRD}}{\text{Jumlah calon legislatif}}$	0,98%	0.98%

Sasaran								
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih} \times 100}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap}}$	74%	-	-	-	75%	75%
	Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Orkemas/LSM yang aktif} \times 100}{\text{Jumlah Orkemas/LSM seluruhnya}}$	65%	72%	65%	70%	72%	75%



Tujuan 3. : Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman di masyarakat

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun 2019
1	Penurunan angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal yang terjadi tahun lalu - Jumlah tindak kriminal yang terjadi tahun ini <i>dibagi</i> Jumlah tindak kriminal yang terjadi tahun ini X 100	12,5%	0,5%

Sasaran								
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	$\frac{\text{potensi kamtibmas yang terjadi}}{\text{Potensi kamtibmas seluruhnya}} \times 100$	77%	78%	78%	100%	100%	100%



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memiliki 3 tujuan, 3 indikator tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator sasaran, yang terinci sebagai berikut :

- Tujuan pertama : 1 sasaran : 1 indikator sasaran
- Tujuan kedua : 1 sasaran : 2 indikator sasaran
- Tujuan ketiga : 1 sasaran : 1 indikator sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran “ Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat ” tertuang dalam tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
 Penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran:
 Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat

Faktor Eksternal	Peluang : 1. Adanya peraturan perundangan tentang penyelenggaraan PKBN 2. Adanya program nasional dalam penanganan HAM 3. Adanya peraturan perundangan sbg dasar hukum pembentukan FKUB 4. Telah terbentuknya FKUB	Tantangan : 1. Lunturnya semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air 2. Maraknya pemakaian narkoba di kalangan generasi muda 3. Belum terbentuk Forum Pembauran Kebangsaan 4. Munculnya ajaran/aliran yg bertentangan dengan pokok-pokok ajaran yg ada
Faktor Internal		
Kekuatan : 1. Adanya dukungan dana yang cukup dari APBD 2. Tersedianya sumber daya aparatur 3. Adanya dukungan dana yang cukup dari APBD 4. Adanya sekretariat FKUB	Alternatif Strategi : 1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB	Alternatif Strategi : 1. Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air & bangsa, kesadaran bela negara, seni & budaya dalam kehidupan masyarakat 2. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dalam FKUB
Kelemahan : 1. Belum optimalnya pembinaan / sosialisasi tentang HAM 2. Belum optimalnya	Alternatif Strategi : 1. Memasyarakatkan pemahaman dan pengalaman prinsip-prinsip HAM beserta peraturan	Alternatif Strategi : 1. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan/ seminar / sosialisasi tentang wawasan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

pembinaan pada kepercayaan	pembinaan penghayat	an perundangannya kepada masyarakat 2. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB	kebangsaan dan bela negara 2. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dalam FKUB
----------------------------	---------------------	--	--

Dari tabel di atas dapat ditentukan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pencapaian indikator sasaran pertama yaitu "Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat" sebagaimana tertuang dalam tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7
 Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
 Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali & memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran bela negara, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara 4. Memasyarakatkan pemahaman dan pengalaman prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 5. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dalam FKUB 6. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB



Tabel 4.9
 Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	1. Mendukung pelaksanaan pemilu yang aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 3. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan & kehidupan politik serta perluasan sistem informasi politik 4. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 5. Peningkatan peran & kapasitas pengurus parpol dalam sistem politik
		Prosentase Ormas/LSM yang aktif	6. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM

Selanjutnya, perlu disusun perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran ketiga yaitu "meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat". Adapun perumusan strateginya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
 Penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran:
 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan :
	1. Adanya peraturan perundangan dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Adanya sistem koordinasi dengan instansi terkait baik horisontal maupun vertikal 3. Adanya program pena-	1. Munculnya paham yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan 3. Keberadaan orang asing yang tidak terpantau 4. Heterogenitas masyarakat yang memudahkan terjadinya benturan



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Faktor Internal	nganan gangguan keamanan terpadu	5. Keberadaan perguruan pencak silat yang sering menimbulkan ketegangan
Kekuatan : 1. Adanya dukungan dana yang cukup dari APBD 2. Tersedianya sumber daya aparatur 3. Adanya SK pembentukan Kominda dan Tim Terpadu di Kota Madiun	Alternatif Strategi 1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas
Kelemahan : 1. Belum maksimalnya pelaksanaan pemantauan 2. Belum optimalnya penyusunan laporan hasil pemantauan 3. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Belum dimilikinya data pemetaan daerah rawan konflik 5. Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing 6. Masih kurangnya kemampuan / ketrampilan aparat inteljen	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 2. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas

Dari tabel di atas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat” sebagaimana tertuang dalam tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11
 Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
 Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen



4.3.2. Kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Penentuan tujuan, indikator tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang akan dijadikan pedoman pencapaian visi misi dalam tahun 2014 – 2019 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12
 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan menuju Kota Madiun yang sejahtera				
MISI I : Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dalam kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Potensi Konflik SARA	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran bela negara, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan/ seminar/sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, sosial, budaya dan agama 3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui forum partisipasi masyarakat



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

			<p>4. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat</p> <p>5. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dlm FKUB</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB</p>	<p>4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB</p> <p>5. Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama</p>
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis</p>	<p>Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu</p>	<p>1. Mendukung pelaksanaan pemilu yg aman, langsung, umum, bebas dan rahasia</p> <p>2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah</p> <p>3. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan dan kehidupan politik serta perluasan sistem informasi politik</p> <p>4. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat</p> <p>5. Peningkatan peran dan kapasitas pengurus Parpol dalam sistem politik</p> <p>6. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM</p>	<p>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik</p> <p>2. Peningkatan validasi data parpol</p> <p>3. Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik</p> <p>4. Peningkatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu</p> <p>5. Peningkatan validitas data ormas / LSM</p>



Rencana Strategis (Renstra)

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman di masyarakat	Penurunan angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam de-teksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kerjasama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban2. Meningkatkan sistem dan kemampuan dalam kegiatan intelijen daerah3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu yang indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme SKPD dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Untuk mendukung pelaksanaan program utama yang menjadi urusan wajib / Belanja Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dijabarkan dalam kegiatan belanja rutin yang terdiri 4 (empat) program dan implementasi kedalam 8 (delapan) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan;
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas.
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a. Penyusunan Renstra SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

Untuk program prioritas yang menjadi urusan wajib / belanja langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, terdiri dari 4 (empat) program yang dijabarkan ke dalam 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat;
 - b. Pemantapan Ideologi dan HAM.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :
 - a. Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;



- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa;
 - c. Pelestarian Budaya Bangsa;
 - d. Seminar Generasi Muda dalam Upaya Peningkatan Rasa Patriotisme;
 - e. Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan;
 - f. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan;
 - g. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
 - h. Peningkatan Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 - i. Pembinaan Generasi Muda Dalam Memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja.
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, yaitu :
- a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol;
 - b. Penyuluhan Kepada Masyarakat;
 - c. Penyusunan Data Base Partai Politik;
 - d. Posko dan Monitoring Pemilukada Gubernur dan Walikota;
 - e. Posko dan Monitoring Pemilu Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden.
 - f. Penyusunan Database Ormas / LSM;
 - g. Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Pemuda;
 - h. Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM;
4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu :
- a. Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian;
 - d. Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 - e. Pemetaan Daerah / Wilayah yang Berpotensi Kerawanan / Konflik;
 - f. Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan.



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2015 – 2019 secara terperinci tertuang dalam tabel 5.1 di bawah ini :



Tabel 5.1
 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ORGANISASI				1 19 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya tertib administrasi perkantoran	100%	100%	194	100%	273,8	100%	292,2	100%	323	100%	350	100%	1442	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 01 1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	7 jenis	133,5	7 jenis	182,2	7 jenis	182,2	7 jenis	184	7 jenis	200	35 jenis	881,9	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 01 2	Koordinasi dan konsultasi daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke-luar daerah	54 kali	69 kali	60,5	69 kali	91,6	69 kali	110	69 kali	139	69 kali	150	345 kali	559,1	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%	52,7	100%	65,2	100%	78,2	100%	83	100%	90,5	100%	369,7	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								realisasi	Rp (dml juta)	Kondisi saat ini	Rp (dml juta)	target	Rp (dml juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PROGRAM PENINGKATAN				1 19 12 02 1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	1 gedung	2 unit	9,6	1 unit	12	1 unit	14,4	1 unit	15	1 unit	17	6 unit	68	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 02 2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara	1 unit	16 unit	25,4	24 unit	26,3	24 unit	31,6	24 unit	33	24 unit	35	80 unit	151,3	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 02 3	Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipelihara	7 jenis	7 jenis	17,7	7 jenis	26,9	7 jenis	32,2	7 jenis	35	7 jenis	38,5	35 jenis	183,8	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	-	100%	15	100%	15	100%	20	100%	30	100%	75	100%	155	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 03 1	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra	Dokumen renstra	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50	1 dokumen	50	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 03 2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	-	5 jenis	15	5 jenis	15	9 dok	20	9 dok	30	9 dok	35	37 dok	115	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								realisasi	Rp (d/m juta)	Kondisi saat ini	Rp (d/m juta)	target	Rp (d/m juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1 19 12 04	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	373,2	-	-	-	-	-	-	-	100%	373,2	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1 19 12 04 1	Pengadaan sarana prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kantor	-	13 jenis	373,2	-	-	-	-	-	-	-	13 jenis	373,2	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yg plural	Potensi Konflik SARA	Potensi konflik sosial yang terjadi di masy.	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	1 19 12 15	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	0	1558.5	0	1614.7	0	858	0	850	0	920	0	5831,2	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 15 1	Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	4.289 orang	4.289 orang	674,9	4.289 orang	685,7	-	-	-	-	-	8.578 orang	1360,6	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1 19 12 15 2	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa	Jumlah peserta sarasehan	175 orang	175 orang	71	175 orang	71	-	-	-	-	-	250 orang	142	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1 19 12 15 3	Pemantapan Ideologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	600 orang	187,6	600 orang	198	600 orang	198	600 orang	200	600 orang	220	3.000 orang	1013,6	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 15 4	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	-	4.270 orang	625	4.270 orang	660	4.270 orang	660	4.270 orang	660	4.270 orang	700	21.360 orang	3335	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	-	9	560	9	864,8	9	1729.202	9	1564,65	9	1940	9	6685,3	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 15 1	Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	4.289 orang	-	-	-	-	790 orang	685,768	790 orang	690	790 orang	700	2.370 orang	2075,7	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 15 2	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa	Jumlah peserta sarasehan	175 orang	-	-	-	-	175 orang	80	550 orang	224,65	550 orang	224,65	550 orang	529,3	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1 19 12 16 3	Pelestarian Budaya Bangsa	Jumlah peserta pembinaan	-	200 orang	80	200 orang	80	200 orang	90	200 orang	92	200 orang	110	600 orang	250	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16 4	Seminar Generasi Muda dalam Upaya Peningkatan Rasa Patriotisme	Jumlah peserta seminar	-	250 orang	125	-	-	-	-	-	-	-	-	250 orang	125	Bakesbangpol	Jl. Udowo No.01 Madiun
				1 19 12 16 5	Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Jumlah peserta work shop	-	150 orang	60	150 orang	65	150 orang	80	150 orang	80	150 orang	90	450 orang	205	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16 6	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	-	-	-	150 org	130,7	150 org	130,7	150 org	140	150 org	155	600 org	556,4	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16 7	Pembinaan generasi muda dan pemilihan duta anti narkoba	Jumlah peserta	-	-	-	700 orang	312,1	-	-	-	-	-	-	700 orang	312,1	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16	Pembinaan Generasi Muda Dalam Memperkokoh NKRI	Jumlah peserta	-	-	-	-	-	800 orang	312,1	800 orang	350	800 orang	385	2.400 orang	1047,1	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja																	Madiun
				1 19 12 16 8	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pertemuan FKUB	4 FKUB, 4 DP, 1 Forkomkon	9 kali	60	9 kali	62	10 kali	265.634	9 kali	80	9 kali	80	46 kali	547.634	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1 19 12 16 9	Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	-	150 orang	70	150 orang	70	150 orang	85	150 orang	90	150 orang	110	750 orang	425	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
			Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	1 19 12 16 10	Penyusunan Database Orkesmas / LSM	Buku database ormas/LSM	100	100 eks	20	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1 19 12 16 11	Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM	Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	100	100 orang	70	100 orang	70	-	-	-	-	-	-	200 orang	140	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1 19 12 16 12	Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Jumlah peserta sarasehan	600	600 orang	75	600 orang	75	-	-	-	-	-	-	1.200 orang	150	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)													
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatkan pemahaman & kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dlm kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis & demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	1	19	12	17		Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Prosentase parpol dan Orkemas yg memahami regulasi	100%	100%	50	100%	54	100%	562	100%	1680	100%	1520	100%	3691	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1	19	12	17	1	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan	74%	-	-	-	-	2000 orang	350	2200 orang	400	2200 orang	400	6000 orang	1150	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1	19	12	17	2	Penyusunan data base partai politik	Jumlah buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 eks	30	100 eks	30	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1	19	12	17	3	Posko dan monitoring Pemilu-Kada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota	Petugas caraka, Tim Desk Pemilu Kada	74%	-	-	-	-	-	360 orang	1.000	-	-	360 orang	1.000	360 orang	1.000	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1	19	12	17	4	Posko dan monitoring Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	Petugas caraka	74%	-	-	-	-	-	-	-	360 orang	1.000	360 orang	1.000	360 orang	1.000	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1 19 12 17 5	Pemutakhiran data, verifikasi dan bintek pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik	Jumlah Parpol penerima bantuan	11	10 parpol	50	10 parpol	54	-	-	-	-	-	-	20 parpol	104	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 17	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peserta pengelolaan Keuangan Parpol	11	-	-	-	-	10 parpol	54	10 parpol	60	10 parpol	70	30 parpol	184	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
			Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	1 19 12 16 6	Penyusunan Database Orkesmas / LSM	Buku database ormas/LSM	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100 eks	30	200	50	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16 7	Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM	Jumlah pengurus Orkemas yang memperoleh pembinaan	100	-	-	-	-	100 orang	75	100 orang	120	100 orang	120	500 orang	315	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
				1 19 12 16 8	Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan Pemuda	Jumlah peserta sarasehan	600	-	-	-	-	600 orang	83	600 orang	100	600 orang	100	2400 orang	283	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi							
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)									
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa ten tram, tertib dan aman dimasyarakat	Penurunan angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	1	19	12	18	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah tindak kriminal dalam masyarakat	7	7	842	7	896	7	896	7	1400	7	1428	7	5362	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun				
				1	19	12	18		1	Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Keter-tiban Masyarakat	Jumlah demo yang dipantau	12	13	65	1	78											Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
										Jumlah pemantauan Kamtibmas						72	78	72	75	72	83	230	379					
				1	19	12	18		2	Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan Kamtibmas	Jumlah peserta yg memperoleh pembinaan	60	910	209	900	220	900	220	900	225	900	250	4.510 orang	1124	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun		
1	19	12	18	3	Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitian	Jumlah ijin survey / penelitian yg dimonitor	225 ijin	291 ijin	38	288 ijin	46	225 ijin	46	230 ijin	50	235 ijin	55	1.269 ijin	235	Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun							



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
Tahun 2014-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
								realisasi	Rp (dlm juta)	Kondisi saat ini	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)	target	Rp (dlm juta)							
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				1	19	12	18	4	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi dg instansi terkait, sosialisasi	12 kali	12 kali	275	4 kali, 1200 org	315										Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
															19 kali	315	19 kali	800	19 kali	800	73 kali	2505				
				1	19	12	18	5	Pemetaan Daerah / Wilayah yang Berpotensi Kerawanan Konflik	Jumlah dokumen pemetaan daerah rawan konflik	-	90 eks	35	-	-	-	-	-	-	-	90 eks	35		Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun	
				1	19	12	18	6	Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Jumlah rakor dengan instansi terkait, sosialisasi	-	12 rakor	220	12 rakor, 500 org	237										Bakesbangpol	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
															5 kali	237	5 kali	250	5 kali	275	39 kali	1219				



BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun bertujuan untuk mewujudkan Misi 4 Pemerintah Kota Madiun yang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif

Sasaran : Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan

Sedangkan indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran :

- a. Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi;
- b. Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi.

Adapun Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Madiun

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2013	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun.



BAB VII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang (2014 - 2019), yang dalam penyusunannya memperhatikan pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan mengacu RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019, serta memperhatikan tugas dan fungsi dan sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi rencana kerja mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun masa transisi.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun menjadi acuan dalam evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan adanya dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun akan sangat membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun untuk melihat sejauh mana capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional dan bahkan mungkin keadaan global sehingga kemungkinan adanya perubahan-perubahan kondisi makro yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sangat mungkin berpengaruh terhadap kondisi daerah. Oleh karena itu dimungkinkan adanya perubahan terhadap dokumen RPJMD sehingga perlu juga dilakukan revisi terhadap Renstra OPD. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Madiun, Agustus 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002